

“di Rumah Unika”

Diskusi Rutin Bersama

Hadapi Covid-19 oleh Unika

**Kumpulan Berbagai Kajian Keilmuan Terkait Pandemi Covid-19
Dari Unika Untuk Negeri, Etalase Pengetahuan Sebagai
Suplemen Untuk Meningkatkan Imun Kehidupan**



Editor: Dr. Heny Hartono

Universitas Katolik Soegijapranata

"di Rumah Unika"

Diskusi Rutin Bersama Hadapi Covid-19 oleh Unika

**Kumpulan Berbagai Kajian Keilmuan terkait Pandemi
Covid-19 dari Unika untuk Negeri, Etalase Pengetahuan
Sebagai Suplemen untuk Meningkatkan Imun
Kehidupan**

Editor:

Dr. Heny Hartono

Penerbit:

Universitas Katolik Soegijapranata

“di Rumah Unika”

Diskusi Rutin Bersama Hadapi Covid-19 oleh Unika

Kumpulan Berbagai Kajian Keilmuan terkait Pandemi Covid-19 dari Unika
untuk Negeri, Etalase Pengetahuan Sebagai Suplemen untuk
Meningkatkan Imun Kehidupan

Editor: Dr. Heny Hartono

LPPM (Lembaga Penelitian dan pengabdian Masyarakat) Universitas
Katolik Soegijapranata

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan
sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik
maupun mekanis, termasuk memfotocopy, merekam atau dengan sistem penyimpanan
lainnya, tanpa izin tertulis dari Penulis dan Penerbit.

©Universitas Katolik Soegijapranata 2020

ISBN : **978-623-7635-23-9** (PDF)

Desain Sampul : **YB Dwi Setianto**

Perwajahan Isi : **Ignatius Eko**

PENERBIT:

Universitas Katolik Soegijapranata

Anggota APPTI No. 003.072.1.1.2019

Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang 50234

Telpon (024)8441555 ext. 1409

Website : www.unika.ac.id

Email Penerbit : ebook@unika.ac.id



SAMBUTAN REKTOR UNIKA SOEGIJAPRANATA

Bapak Ibu yang saya hormati

Salam sejahtera bagi kita semua

Di masa pandemi Covid-19 saat ini yang tidak memungkinkan kita semua untuk berkumpul dan berdiskusi secara fisik dalam ranah akademik telah mendorong dan menumbuh ide maupun kreatifitas kita semua untuk tetap berdinamika membahas berbagai masalah yang ada di sekitar kita dan menemukan solusi secara bersama. Teknologi informasi telah menjadi jembatan dan media yang efektif dalam mempertemukan kita semua di ruang virtual dan menyalurkan berbagai pendapat yang ada di benak kita.

Unika Soegijapranata melalui berbagai infrastruktur digital nya yang telah dibangun sejak lebih dari 10 tahun yang lalu memungkinkan pertemuan secara virtual dapat terlaksana. Tinggal bagaimana kita semua memanfaatkan dengan baik, terutama di masa sekarang ini.

Untuk itu, saya sungguh mengapresiasi inisiatif dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Unika Soegijapranata untuk menyelenggarakan kegiatan “di Rumah Unika” atau “diskusi rutin bersama hadapi Covid-19 oleh Unika” setiap Kamis mulai minggu ini yaitu tanggal 14 Mei 2020 setiap jam 3 sampai jam 5 sore.

Berbagai aspek dari 10 Fakultas yang ada di Unika Soegijapranata dibahas di dalam kegiatan ini, dari Fakultas Psikologi, Teknik, Ekonomi dan Bisnis, Arsitektur dan Desain, Bahasa dan Seni, Teknologi Pertanian, Hukum dan Komunikasi, Kedokteran, Ilmu Komputer, Ilmu dan Teknologi Lingkungan, serta Pusat-Pusat Studi seperti Pusat Studi Wanita, The Java Institute, Pusat Studi Urban, serta Lingkungan Manusia dan Bangunan.

Semoga dapat memberikan pencerahan bagi kita semua dan menghasilkan solusi-solusi bagi masyarakat serta negara dan bangsa yang kita cintai ini

Terima kasih. Tuhan memberkati

Semarang, 14 Mei 2020

Rektor Unika Soegijapranata Semarang,

Prof. Dr. Ridwan Sanjaya, MS, IEC

SAMBUTAN KEPALA LPPM

(Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat)

Situasi pandemi Covid-19 berdampak pada semua lini. Justru sekarang kami harus menyadari, bahwa Unika Soegijapranata sebagai institusi pendidikan tinggi di Jawa Tengah ini, harus mampu memberikan kontribusi sebagai bagian dari modal pengetahuan yang kami miliki dan perwujudan Talenta Pro Patria et Humanitate, maka LPPM mengadakan kegiatan diskusi #dirumahUnika ini. Berbagai fakultas dan Pusat-pusat studi yang dimiliki bergerak bersama berupaya memberikan kontribusi pemikiran, pengalaman dan solusi-solusi yang sekiranya bisa diterapkan dalam melakukan adaptasi dan berjalan menuju new normal setelah pandemi.

Buku ini merupakan kumpulan dari seluruh materi yang diberikan di acara diskusi serial, harapannya pengetahuan dan informasi di buku ini bisa bermanfaat untuk negeri, minimal bisa memberikan sosialisasi, edukasi, dan mitigasi pandemi yang dihadapi masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Tentunya acara diskusi #dirumahUnika dan buku ini masih jauh dari sempurna, meski demikian semoga tetap memberi optimisme, energy positif dan manfaat yang bisa diterima oleh semua pihak berkaitan dengan pandemi Covid-19 ini.

Kami mengucapkan terima kasih pada pimpinan dan seluruh civitas yang telah berpartisipasi

Terima kasih juga untuk semua pimpinan daerah kami, semoga kontribusi Universitas ini membantu dalam semua kebijakan pimpinan daerah untuk kita kembali bangkit dari dampak pandemi.

Tuhan memberkati

Semarang, 20 Mei 2020

Ka LPPM Unika Soegijapranata

Dr. Berta Berti Retnawati



SAMBUTAN GUBERNUR JAWA TENGAH

(Dinarasikan dari sambutan lisan Gubernur Jawa Tengah melalui rekaman video klip)

Teman-teman civitas akademika Unika Soegijapranata,

Saya menghimbau Anda semua dapat terus mengikuti serial diskusi Di Rumah Unika sebab ada diskusi yang menarik tentang bagaimana menghadapi dan mencari solusi bersama permasalahan dan mitigasi Covid-19.

Saya kira butuh pikiran-pikiran jernih untuk menyelesaikan persoalan. Nampaknya kita harus menawarkan new normal yaitu cara hidup baru yang mungkin berbeda dari cara hidup yang kemarin agar kemudian kita dapat beraktivitas dan mengerti apa yang harus kita lakukan. Selalu menjaga diri, memakai masker, menjaga jarak, olah raga terus menerus, hidup sehat, dan tentu saja selalu cuci tangan.

Mudah-mudahan diskusi ini bermanfaat dan masyarakat mendapatkan gambaran yang cerah, arah yang cerah, dan solusi-solusi yang cerdas dari kawan-kawan Unika.

Selamat berdiskusi.

Semarang, 14 Mei 2020

Gubernur Jawa Tengah,

H. Ganjar Pranowo, SH, M.I.P

SAMBUTAN KETUA BAPPEDA PROVINSI JAWA TENGAH

(Dinarasikan dari sambutan lisan Kepala Jawa Tengah
melalui rekaman video klip)

Covid 19 telah memberikan kepada kita sebuah pelajaran yang sangat mahal. Banyak hal yang harus kita lakukan termasuk bagaimana melakukan revolusi baik kegiatan maupun perspektif kita di dalam menghadapi covid ini. Saya mengucapkan selamat kepada civitas akademika Unika Soegijapranata yang akan melaksanakan diskusi mingguan dalam rangka menghadapi covid-19 ini. Kami dari institusi pemerintah daerah, selain ingin mendapatkan masukan dari semua stakeholder, kami juga mengajak bapak ibu civitas akademika Unika Segijapranata untuk turut terlibat di dalam menghadapi fenomena baru ini baik dalam konteks perencanaan ke depan maupun dalam menghadapi permasalahan ini di kehidupan bersama kita sehari-hari ke depan.

Selamat sekali lagi kepada Unika atas terselenggaranya diskusi mingguan ini.

Semarang, 14 Mei 2020

Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah,

Dr. Prasetyo Aribowo, SH, M.SOC, SC

PRAKATA EDITOR

Pandemi Covid-19 adalah sebuah prahara global yang telah melintasi dan singgah di 175 negara. Dampak yang ditimbulkan oleh virus ini telah mengoyak banyak aspek kehidupan baik secara individu maupun secara komunal. Dalam sejarah peradaban manusia, pandemi covid-19 adalah salah satu bencana global yang memberikan banyak pelajaran berharga bagi manusia di seluruh dunia. Perjalanan, dampak, serta solusi atas pandemi ini membawa makna dan warna yang berbeda-beda, tergantung dari perspektif, dimensi, dan kedalaman cara pandang setiap individu yang terlibat di dalamnya. Seperti potongan-potongan puzzle yang disatukan, kemeriahan warna perspektif atas covid-19 menjadi sebuah gambar yang indah dan membawa pencerahan untuk langkah-langkah ke depan selepas prahara ini.

Tulisan-tulisan di dalam buku ini adalah gambaran kekayaan intelektual sekaligus kepekaan sosial religius dari para penulis artikel yang tersaji di dalam buku ini. Keberagaman gaya tulis, pemaparan ide dan analisa yang tampak dalam buku ini menunjukkan keotentikan tulisan para civitas akademika Unika Soegijapranata yang dibungkus dengan pemikiran kreatif, solusi cerdas, serta rasa cinta mendalam akan tanah air.

Setiap tulisan yang disajikan dalam buku ini disarikan oleh masing-masing penulis dari paparan yang dikaji Di Rumah Unika—sebuah serial diskusi yang menyoroti sekaligus menawarkan solusi kreatif atas

beragam fenomena yang muncul sebagai dampak covid-19. Mengiringi hangatnya serial diskusi yang telah berlangsung, kiranya buku ini dapat memberikan masukan dan wawasan baru bagi setiap pihak yang berkepentingan.

Dengan keyakinan bahwa kita semakin dekat pada akhir pandemi covid-19, buku ini menjadi bagian dari sebuah sejarah “Di Rumah Unika”, di mana banyak solusi cerdas telah disiapkan oleh civitas akademika Unika Soegijapranata untuk menyongsong kenormalan baru. Selamat berdinamika melalui tulisan-tulisan inspiratif dalam buku ini.

Semarang, 23 Mei 2020

Editor,

Dr. Heny Hartono, SS, M.Pd

Daftar Isi

SAMBUTAN REKTOR UNIKA SOEGIJAPRANATA	iii
Prof. Dr. Ridwan Sanjaya, MS, IEC.....	iv
SAMBUTAN KEPALA LPPM	v
Dr. Berta Bakti Retnawati	vi
SAMBUTAN GUBERNUR JAWA TENGAH	vii
H. Ganjar Pranowo, SH, M.I.P	viii
SAMBUTAN KETUA BAPPEDA PROVINSI JAWA TENGAH.....	ix
Dr. Prasetyo Aribowo, SH, M.SOC, SC	ix
PRAKATA EDITOR	x
Normal Baru dalam Perguruan Tinggi	1
Prof. Dr. F. Ridwan Sanjaya, MS.IEC	1
Bergerak bersama di <i>New Normal</i> : Adaptif dan Transformatif	11
Dr. Berta Bakti Retnawati	11
Edukasi Psikososial pada Masa Pandemi Berbasis Kognitif-Behavioral dan Komunitas.....	22
Dr. Augustina Sulastri.....	22
Mengelola Stress dalam Masa Pandemi Covid-19	33
Kuriake Kharismawan, M.Si.....	33
Ide Kreatif Perangi Covid-19	46
Dr. Leonardus Heru Pratomo	46
Imbas Virus Corona pada Transportasi	55
Djoko Setijowarno, MT	55
Ekonomi Rakyat, Jalan Kebudayaan Paska Pagebluk	74
Dr. Angelina Ika Rahutami.....	74

Stimulus Pajak dan Geliat WP: Melawan Belenggu Corona	89
Paulina Rini Hastuti, M.Si	89
Perilaku Investor Pasar Modal Masa Pandemi Covid-19.....	108
Dr. Elizabeth Lucky Maretha Sitinjak.....	108
Peran Arsitektur Modular sebagai Konsep Fasilitas Penyedia Sarana dan Prasarana Penanganan Darurat Pasien Covid-19.....	120
Bonifacio Bayu S., ST, M.Sc.	120
Peran Komunikasi Visual di Tengah Pandemic Covid-19.....	137
Ryan Sheehan Nababan, M.Sn	137
Meme Internet dan Pandemi Covid-19: <i>Dulce et Utile</i>	154
B. Retang Wohangara, SS, M.Hum	154
Seni Pertunjukan Musik dan Covid-19	164
Yosaphat Yogi Tegar Nugroho, S.Sn, M.A.....	164
Krisis Covid-19 di Indonesia dalam Perspektif Analisis Risiko	173
Prof. Dr. Ir. Y Budi Widianarko, MSc	173
Melawan Covid-19 Dengan Probiotik	192
Dr. Laksmi Hartajanie, MP.....	192
Sidang Pengadilan <i>On-Line</i> : Masa Pandemi Covid-19	200
Dr. Marcella Elwina Simandjuntak, SH., CN., M.Hum.....	200
Aspek Hukum Kepailitan Bagi Perusahaan dalam Pandemi <i>Covid-19</i>	217
Dr. Yohanes Budi Sarwo.....	217
Covid-19 Menggila, dimanakah Tanggung Jawab Negara	231
Dr. Endang Wahyati Yustina.....	231
Social Mixing dan Trend Transmisi-Kematian Covid-19	246
Perigrinus H. Sebond, MPH	246
Optimalisasi Telemedicine	257

dr. Jessica Christanti, M.Kes.....	257
Protokol Sistem Keamanan Alat Kesehatan dalam Implementasi Telemedicine ..	269
YB Dwi Setianto, S.T., M.Cs.	269
Membuat Sendiri Aplikasi Mobile Belajar Anak Usia Dini di Tengah Pandemi Covid-19.....	279
Agus Cahyo Nugroho, MT	279
Pembangunan Infrastruktur di Tengah Pandemi Covid-19	286
Dr. Rr. M. I. Retno Susilorini.....	286
<i>From the Home Front</i> : Perempuan Indonesia saat Pandemi Covid-19.....	301
Angelika Riyandari, PhD	301
Tempe Koro di Jawa Untuk Covid-19	319
Dr. Christiana Retnaningsih.....	319
Sadar Sehat Berkat Covid-19.....	334
Dr. Lindayani	334
Gerakan Sosial Kaum Urban Era Pandemi Covid-19.....	342
Andreas Ryan Sanjaya, MA	342
Daftar Pustaka.....	355
Terkurung Pandemi dan Konflik Bersenjata	357
Dr. Trihoni Nalesti Dewi	357
WFH TERHADAP KUALITAS LINGKUNGAN	369
WFH dan Jejak Karbon	382
IM. Tri Hesti Mulyani, MT	382
Haryo Guritno, M.Si	382
Bonus <i>WFH</i> Pada Masa Covid-19 Rumah Hijau Produktif melalui Akuaponik.....	394
Dr. Sri Rejeki.....	394
Indeks	406

Aspek Hukum Kepailitan Bagi Perusahaan dalam Pandemi *Covid-19*

Dr. Yohanes Budi Sarwo

Dosen Fakultas Hukum dan Komunikasi

UNIKA Soegijapranata, Semarang

Pendahuluan

Pandemi virus corona (Covid-19) yang terjadi membawa dampak pada berbagai permasalahan dalam semua segi aktivitas kehidupan. Salah satu yang terdampak adalah terpukulnya sektor usaha di Indonesia, dimana banyak perusahaan yang tidak dapat menjalankan usahanya bahkan tidak sedikit yang telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bagi para pekerja. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani (Katadata.co.id, Senin, 13 April 2020), yang mengatakan “banyak perusahaan telah bernegosiasi untuk memotong gaji karyawannya hingga meminta mereka mengambil cuti di luar tanggungan atau “*unpaid leave*” dalam waktu yang tak ditentukan”. Kondisi ini terjadi karena adanya pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dimana kinerja sektor tersebut akan semakin turun dan beban pelaku usaha semakin tinggi, lantaran perusahaan yang sebelumnya beroperasi secara penuh terpaksa

berhenti sebagian bahkan berhenti secara total. Sehingga banyak perusahaan tidak mampu memenuhi pesanan pada pelanggan dan dapat dipastikan perusahaan ada dalam kondisi ketidak mampuan untuk memenuhi prestasinya berupa pembayaran utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dalam kondisi seperti ini, maka perusahaan dapat diajukan pailit oleh kreditornya, karena telah memenuhi unsur yang diatur dalam **Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang** (selanjutnya disebut **UUK dan PKPU**). Dalam **Pasal 2 Ayat (1) UUK-PKPU** disebutkan: *“debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Kreditor-nya”*. Berdasarkan pada ketentuan ini, maka tidak sedikit perusahaan yang dapat dipailitkan oleh para Kreditornya karena Debitor tidak mampu membayar utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian usahanya. Kondisi seperti ini tentu akan semakin menghancurkan perekonomian di Indonesia. “Bisa dibayangkan, akhir 2020 dan sepanjang 2021 akan sangat banyak Debitor yang dimohonkan Pailit atau PKPU.

Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia.

Pengertian kepailitan telah di atur dalam Pasal 1 angka 1 UUK dan PKPU yaitu: *“Sita umum atas semua*

kekayaan Debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini". Berdasarkan definisi ini maka Kepailitan juga diartikan sebagai suatu proses dimana seorang Debitor yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya yang harus dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga dan harta Debitor tersebut disita untuk dibagikan kepada para Kreditor sesuai dengan peraturan kepailitan. Hal sesuai dengan salah satu tujuan undang-undang kepailitan adalah untuk mencegah para Kreditor yang akan berlomba dengan segala cara, baik yang halal maupun yang tidak guna mendapatkan pelunasan tagihannya lebih dahulu.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka ketidak cukupan substansi kepailitan yang diatur dalam KUH Perdata, diperlukan adanya pengaturan dalam undang-undang yang dapat melindungi debitor dan kreditor yang beretiket baik, sehingga mendapatkan keadilan dalam mewujudkan keseimbangan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Sejarah pengaturan hukum kepailitan di Indonesia terjadi pada saat Indonesia mengalami krisis moneter pada tahun 1997/1998. Pada tahun tersebut, pemerintah Indonesia telah membuat peraturan kepailitan yang dituangkan dalam Perpu No. 4 Tahun 1998 dan akhirnya diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dan disempurnakan dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK dan PKPU).

Fungsi dari undang-undang kepailitan dan Penundaan Kewajiban pembayaran utang adalah untuk mengatur mengenai tingkat prioritas dan urutan pelunasan masing-masing piutang, serta mengatur cara membagi hasil penjualan harta kekayaan debitor untuk melunasi piutang-piutang masing-masing kreditor berdasarkan tingkat prioritasnya. Di samping itu juga mengatur bagaimana cara agar seorang Debitor dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan, yang secara rinci undang-undang kepailitan menentukan tentang kebenaran mengenai adanya suatu piutang, serta cara membagi hasil penjualan harta kekayaan debitor kepada para kreditor, serta mengenai upaya perdamaian yang dapat ditempuh oleh Debitor dengan Kreditornya baik sebelum maupun sesudah Debitor dinyatakan pailit di pengadilan.

Syarat-Syarat dan Akibat Hukum Perusahaan Pailit

Di dalam Pasal 2 Ayat (1) UUK dan PKPU ditegaskan bahwa salah satu syarat permohonan pailit adalah Debitor harus mempunyai 2 Kreditor atau lebih (*concurus creditorium*). Hak Kreditor untuk mengajukan permohonan pengajuan pailit ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa seluruh harta kekayaan Debitor menjadi jaminan utangnya. Adapun Kreditor yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) UUK dan PKPU adalah siapapun Kreditor apakah

statusnya sebagai Kreditor Preference atau Kreditor Konkuren, namun terkait dengan pasal ini, Kreditor pemegang hak jaminan tidak harus terlebih dahulu melepaskan hak jaminannya apabila akan mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Debitornya. Selain syarat tersebut, juga harus dipenuhi syarat bahwa utangnya harus sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Adapun yang dimaksud telah jatuh waktu dan dapat ditagih adalah utang tersebut telah jatuh waktu bila menurut perjanjian kredit telah sampai pada jadwal waktu untuk dilunasi oleh Debitor sebagaimana ditentukan dalam perjanjiannya.

Pada saat Hakim Pengadilan Niaga mengabulkan permohonan pailit yang diajukan oleh Debitor ataupun Kreditor, maka ada beberapa akibat hukum yang timbul oleh putusan pailit tersebut. Akibat hukum terutama adalah terhadap kewenangan hukum Debitor untuk mengelola harta kekayaannya, karena semua harta kekayaan Debitor dikenai sita umum. Ketentuan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UUK-PKPU yang menyebutkan bahwa *“Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan”*. Harta kekayaan Debitor pailit yang dikenai sita umum yang pengelolaan selanjutnya ada dalam kekuasaan Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas. Dalam peristilahan hukum kepailitan Indonesia disebut Harta Pailit atau budel pailit. Kata *“budel”* berasal dari kata *“boedel”* dalam Bahasa Belanda atau dalam Bahasa Inggris

disebut dengan *"Bankrupt Estate"*. Secara rinci berbagai akibat hukum dari perusahaan pailit dapat dijelaskan seperti dibawah ini.

1. Terhadap Harta Kekayaan Debitor

Putusan Pailit mengakibatkan seluruh harta kekayaan Debitor berubah statusnya menjadi harta pailit, dan terhadap harta pailit ini berlaku sita umum dan Debitor tidak berwenang untuk mengurus dan melakukan perbuatan hukum apapun yang menyangkut hartanya itu. Dengan kata lain Debitor telah dinyatakan berada di dalam pengampunan sepanjang yang menyangkut harta kekayaannya berada dalam pengampunya yaitu Kurator. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 69 Ayat (1) UUK-PKPU bahwa: *"Kurator berwenang melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit untuk kepentingan Kreditor dan Debitor dengan pengawasan Hakim Pengawas"*. Pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit itu berlaku sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

Dalam hal Debitor Pailit adalah perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas maka Kurator dapat melanjutkan usaha Debitor yang dinyatakan pailit walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan upaya hukum kasasi ataupun peninjauan kembali. Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 104 UUK-PKPU, bahwa perusahaan yang dinyatakan pailit kehilangan haknya untuk mengurus perusahaan itu namun kepailitan tidak secara langsung membuat perusahaan itu

berhenti menjalankan operasional perusahaan karena Kurator yang akan mengambil alih perusahaan itu dengan melanjutkan usaha Debitor Pailit. Ketentuan ini sesuai dengan asas “memberikan manfaat dan perlindungan yang seimbang bagi Kreditor dan Debitor”. Asas keseimbangan ini harus memberikan manfaat dan perlindungan kepada Kreditor bila Debitor cidera janji; Kreditor diberikan akses terhadap harta kekayaan Debitor yang dinyatakan pailit.

2. Akibat Pernyataan Pailit Lainnya

Di samping itu ada akibat lain yang diatur dalam Pasal 24 Ayat (1) UUK-PKPU bahwa: *“Debitor pailit demi hukum kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai kekayaan yang termasuk harta pailit, sejak putusan pailit diucapkan”*. Berdasarkan ketentuan ini maka akibat terhadap kekuasaan pengurus perusahaan Debitor atau badan hukum lainnya berkenaan dengan putusan pernyataan pailit oleh pengadilan menjadi beralih pada Kurator dan Hakim Pengawas. Dengan kata lain kekuasaan direksi suatu perseroan terbatas dan badan hukum tersebut “terpasung”, sekalipun mereka menjabatnya. Segala sesuatunya diputus dan dilaksanakan oleh Kurator, dan direksi tidak mempunyai kendali terhadap Kurator, sebaliknya Direksi harus mematuhi petunjuk dan perintah dari Kurator

Kepailitan Perusahaan dan Pandemi

Badai pandemi Covid-19 banyak perusahaan yang mengalami tingkat kesulitan dalam memenuhi kewajiban membayar utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Hal ini dikarenakan adanya sejumlah peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), sehingga tidak sedikit perusahaan telah menghentikan secara total kegiatan usahanya. Kondisi ini tentu membawa dampak multiplayer efek yang luar biasa, yang salah satunya adalah terkait dengan kewajiban Debitor untuk memenuhi prestasinya berupa pembayaran utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Namun masih ada celah yang diatur dalam UUK-PKPU sehingga perusahaan yang masih mempunyai kemampuan untuk menjalankan kegiatan usaha tidak terjebak pada kondisi pailit yang dapat diajukan oleh para Kreditor. Adapun celah tersebut antara lain dapat ditemukan beberapa hal **sebagai** berikut:

1. Insolvensi dalam Kepailitan

Salah satu asas hukum kepailitan yang dianut secara universal adalah bahwa hanya Debitor yang telah insolven (insolvent) saja yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan. berhubung dengan asas yang demikian itu, maka Debitor hanya dapat mengajukan permohonan pailit apabila dapat membuktikan bahwa Debitor telah dalam keadaan insolven. Demikian pula hanya apabila permohonan pailit diajukan oleh Kreditor, maka hanya dapat dilakukan

apabila dapat membuktikan bahwa Debitornya telah dalam keadaan insolven.

Hubungan kepailitan dan insolvensi menjadi penting untuk dipahami masing-masing pengertiannya. Hal ini sebagaimana dikemukakan *Credit Counseling Society*, bahwa dua istilah kepailitan dan insolvensi ini sering membingungkan apabila tidak dipahami dengan baik. Kedua istilah tersebut memiliki arti yang berbeda tetapi terkait satu sama lain dan berjalan berbarengan.

Di Dalam Pasal 8 Ayat (4) UUK-PKPU diatur bahwa: *“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) telah dipenuhi”*. Merujuk pada ketentuan pasal ini, jelas bahwa yang harus terbukti secara sederhana adalah fakta atau keadaan bahwa syarat untuk dinyatakan pailit sebagaimana di dalam Pasal 2 Ayat (1) UUK-PKPU telah terpenuhi, yaitu:

- 1) Ada dua atau lebih Kreditor, yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.
- 2) Ada sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih yang tidak dibayar lunas oleh Debitor. Dalam hal ini ada kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan karena percepatan waktu penagihan nya sebagaimana diperjanjikan, karena sanksi atau denda oleh

instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.

Berdasarkan pada ketentuan tersebut di atas, ada penekanan bahwa Debitor dinyatakan pailit apabila debitur mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, artinya bahwa Debitor dalam kondisi insolven. Hal ini sebagaimana di atur dalam Pasal 57 Ayat (1) UUK- PKPU yang menyebutkan: “Yang dimaksud dengan “insovensi” adalah keadaan tidak mampu membayar”. Guna memahami ketentuan ini maka dapat mengacu pada pendapat Sutan Remy Sjahdeini dalam bukunya Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan, yang menjabarkan penjelasan tentang Debitor yang dalam keadaan insolven, adalah sebagai berikut: “sebuah perusahaan atau pribadi dapat dinyatakan insolven (insolvent) atau pailit (bankrupt) apabila:

- a. Insolvensi terjadi apabila tidak dapat melunasi utangnya;
- b. Insolvensi adalah keadaan debitur yang memiliki jumlah utang yang melebihi seluruh jumlah harta kekayaannya.

Lebih lanjut Sjahdeini menjelaskan bahwa Debitor telah berada dalam keadaan insolven hanya apabila jumlah kewajiban (utangnya) telah lebih besar daripada nilai asetnya (harta kekayaannya). Keadaan Debitor yang seperti itu disebut *balance sheet insolvency*. *Balance sheet insolvency* dilawankan dengan *cash flow*

insolvency, yaitu keadaan keuangan debitur yang tidak memiliki likuiditas yang cukup untuk membayar utangnya pada saat telah jatuh tempo karena arus pemasukan (*cash inflow*) Debitur lebih kecil dari pada arus pengeluarannya (*cash outflow*) sekalipun nilai asetnya masih lebih besar dari pada kewajibannya (belum mengalami *balance sheet insolvency*).

Apabila Debitur tidak membayar utangnya sebagaimana terjadinya *cash flow insolvency*, perkaranya seharusnya bukan diperiksa oleh Pengadilan Niaga, tetapi diperiksa oleh Pengadilan Perdata dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri. Hal ini dikarenakan perkara tidak dibayarnya utang Debitur yang tidak mengalami *balance sheet insolvency* kepada Kreditornya adalah perkara cedera janji atau wanprestasi, bukan perkara kepailitan. Dengan penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa Debitur dapat dinyatakan pailit apabila Debitur memiliki paling sedikit dua Kreditor dan ada sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Jadi dalam hal ini pailit belum tentu harta debitur tidak cukup untuk membayar utang-utangnya. Jadi dengan kata lain pailit harus dimaknai lebih luas sebagaimana pendapat Sutan Remy, yang mengatakan bahwa Debitur dalam keadaan *insolvent* adalah ketika Debitur tidak dapat melunasi utang kepada semua Kreditornya dan Debitur yang memiliki jumlah utang yang melebihi seluruh jumlah harta kekayaannya yang dapat dipailitkan.

2. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Kepailitan dan Penundaan kewajiban pembayaran utang merupakan mimpi buruk bagi para pelaku usaha di Indonesia, karena di dalam UUK-PKPU diatur bahwa cukup dengan dua Kreditor dan satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, tanpa adanya syarat minimal jumlah utang, suatu pihak atau Debitor sudah dapat dipailitkan. Bisa dibayangkan, akhir 2020 dan sepanjang 2021 akan sangat banyak debitur yang dimohonkan Pailit atau PKPU. Guna menghindari permohonan pailit oleh Kreditor, maka masih ada celah yang dapat dilakukan oleh Debitor yaitu melakukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sehingga perusahaan tidak jatuh pailit. Dalam hal ini perlu dibahas lebih lanjut tentang PKPU.

Di dalam Pasal 222 ayat (2) UUK_PKPU disebutkan bahwa: *“Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor”*. Berdasarkan ketentuan ini dapat dipahami sebagai suatu upaya untuk mencapai kata mufakat antara Debitor dengan Kreditor terkait dengan penyelesaian utang-piutang. PKPU dapat dipahami juga sebagai suatu waktu tertentu yang diberikan kepada Debitor dan

Kreditor yang ditetapkan melalui putusan Pengadilan Niaga, guna membuat kesepakatan bersama pembayaran utang sebagian atau seluruhnya dengan cara restrukturisasi. Pada hakikatnya PKPU dimaksudkan tidak berdasarkan pada keadaan di mana Debitor tidak membayar utangnya atau insolven dan juga tidak bertujuan dilakukannya pemberesan (likuidasi budel pailit). Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Fred B.G. Tumbuan bahwa PKPU tidak dimaksudkan untuk kepentingan Debitor saja, melainkan juga untuk kepentingan para Kreditornya, karena dengan memberikan waktu dan kesempatan kepada Debitor diharapkan melalui reorganisasi usahanya dan/atau restrukturisasi atas utang-utangnya, dapat melanjutkan usahanya. Debitor selama masa PKPU tidak kehilangan penguasaan dan hak (*beheer en beschickking*) atas kekayaannya, tetapi hanya kehilangan kebebasannya dalam menguasai kekayaannya, karena segala sesuatu yang dilakukan harus mendapat persetujuan dari pengurus (Pasal 240 Ayat (1) UUK-PKPU, dengan demikian perusahaan akan mampu membayar lunas utang-utangnya.

Langkah yang harus dilakukan adalah dengan cara memberikan kesempatan kepada Debitor untuk berunding dengan para Kreditornya untuk melakukan restrukturisasi utang, baik dengan cara melakukan penjadwalan kembali pelunasan utang Debitor.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka secara sederhana PKPU dapat diartikan sebagai *moratorium legal* yakni penundaan pembayaran utang yang dapat dilakukan

dan dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya krisis keuangan yang semakin parah dan dapat terhindar dari pailit bagi perusahaan yang terdampak Covid-19. Oleh karena itu, kami menyarankan agar perusahaan yang mengalami masalah likuiditas untuk mengambil langkah sesegera mungkin melakukan negosiasi dan membicarakan dengan para Kreditor, sehingga dicapai kesepakatan restrukturisasi kewajiban membayar utang, dan para Kreditor juga akan memahami kondisi perusahaan yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19.

Daftar Pustaka

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Sutan Remy Sjahdeini, 2016, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan, memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*, Jakarta Penerbit: Prenadamedia Grup.